



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING DESA PARBANGUNAN KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 081213622362

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Konsultasi/Audiensi

No. SK : 05/BKBP/2024

Persyaratan

1. Materi Konsultasi/Audiensi secara jelas
2. Waktu Kunjungan Konsultasi/Audiensi dan nomor kontak personal yang dapat dihubungi
3. Ditujukan ke alamat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan Sumatera Utara Kode Pos 22978 Telp/Fax : (0636) 3221589
4. Datang Langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing
2. Kepala Badan mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang yang membidangi materi konsultasi/audiensi untuk mempersiapkan administrasi, bahan dan peralatan (apabila membutuhkan pembahasan dalam forum rapat) atau Kepala Badan dapat langsung memberikan/melayani konsultasi/audiensi kepada pengguna layanan dan dapat didampingi Kepala Bidang yang membidangi materi konsultasi/audiensi
3. Kepala Bidang yang membidangi materi konsultasi/audiensi dapat didampingi Kepala Sub Bidang yang membidangi materi konsultasi,audiensi
4. Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang melaporkan hasil pemberian pelayanan konsultasi/audiensi kepada pimpinan secara berjenjang

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Tujuh (7) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING DESA PARBANGUNAN KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 081213622362

-

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Pertemuan Audiensi dengan Pejabat di Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pembahasan terkait permasalahan ataupun topik yang disampaikan pengguna layanan

Pengaduan Layanan

Secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik